



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) : 01 - 2019	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI BILANGAN)
<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01- - - - - 000

2. NAMA : A02- - - - -

3. ALAMAT : A03- - - - -

4. NO. TELEPON : A04- - - - -

S. EMAIL : A05- - - - -

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOYONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	4	32.750.000	1.182.083
2.	PENERIMA PENSUN BOKKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	22	62.590.127	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJUAL BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. SUKAM PENGHASIL YANG MENYERAHKAN IMBALAN YANG BERTINGKAT BERTINGKAT BERKES KAMBINGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. SUKAM PENGHASIL YANG MENYERAHKAN IMBALAN YANG TIDAK BERTINGKAT BERKES KAMBINGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISIRES ADU DEWAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEKERJAAN TETAP	21-100-10	0	0	0
E.	AMTAN PEGAWAI YANG MENYERAHKAN JAKA PRODUKSI/UMUM BOKKAL/UMUM	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKKAN PENYERAHAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOYONG PPh PASAL 21 TIDAK PINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBELI/ JAKA/PEKERJA KESUKSESAN/PEKERJA/PEKERJA BOKKALA SEBAGAI RAJAS PAJAK LUAR NEGARA	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10		26	95.340.127	1.182.083
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12			0,02	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,03	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,03	1.182.083
LAKUKAN PENGISIAN RADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU RADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHKAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,03	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,01	0
18.	KELEBIHAN SETOR RADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,03	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 000 01.456.835.6 - 512 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG BAYARAT PENSUR, TUNJANGAN HARI TUJUAL JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEWA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEKERJA NEGARA, PEKERJA NEGARA SIPIL, ANGGOTA TNPOLRI DAN PEKERJANYA YANG MENEMPAH KEMERDEKAAN DAN BIKALAH LAH YANG DIBESUKAN KE PADA KELUARGA MENYARAKAN	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PIS PABAL 21 PABAL LAMBA	21-499-00	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA LEBAT 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1.	FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak)	1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5.	FORMULIR 1721 - IV	LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2.	FORMULIR 1721 - II (untuk Satu Tahun Pajak)	LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6.	FORMULIR 1721 - V	LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 3.	FORMULIR 1721 - III	2 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7.	SURAT PETERAN PAJAK (SPP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHAN (Pdk)	LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4.	FORMULIR 1721 - III	LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8.	SURAT KUASA KHUSUS	

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritabukan di atas beserta lampiran-lampiranmy adalah benar, lengkap dan jelas.

1.	<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG	<input type="checkbox"/> KUASA	6.	TANDA TANGAN
2.	NPWP: 000 - 000 - 000			
3.	NAMA: 000			
4.	TANGGAL: 08 - 02 - 2010 (dd - mm - yyyy)			
5.	TEMPAT: 000			



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 01 - 2019

FORMULIR 1721 - II

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK-PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)

FORMULIR 1721 - II

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan penghasilan PPh dengan bukti pemotongan yang menggunakan formulir 1721-III

Untuk Isian : (wajib) KPP
Lampiran 102 : (wajib) Pemotong

NO.	NPWP	NAMA	KORPORASI	PERIODE PEMOTONGAN	TANGGAL (dd-mm-yyyy)	KODE KEMUNGKINAN PAJAK	JUMLAH (Rp)	PPh DIBAYAR (Rp)	KODE BUKTI PEMOTONGAN
1	00.000.000.0-000.000	SUWARNO		13-01-19-0000001	31-01-2019	21-100-03	3.302.000	0	
2	00.000.000.0-000.000	KASMAJI		13-01-19-0000002	31-01-2019	21-100-03	3.361.201	0	
3	00.000.000.0-000.000	EKO SULISTYONO		13-01-19-0000003	31-01-2019	21-100-03	3.401.730	0	
4	00.000.000.0-000.000	TONI YAHYAIN		13-01-19-0000004	31-01-2019	21-100-03	3.647.000	0	
5	00.000.000.0-000.000	ABU TAHERIEN		13-01-19-0000005	31-01-2019	21-100-03	3.372.209	0	
6	00.000.000.0-000.000	PAISNO		13-01-19-0000006	31-01-2019	21-100-03	2.980.612	0	
7	00.000.000.0-000.000	IMAM		13-01-19-0000007	31-01-2019	21-100-03	3.180.371	0	
8	00.000.000.0-000.000	SUTRISNO		13-01-19-0000008	31-01-2019	21-100-03	3.218.448	0	
9	00.000.000.0-000.000	TULLUS WALUYA		13-01-19-0000009	31-01-2019	21-100-03	3.031.667	0	
10	00.000.000.0-000.000	PARLIAN		13-01-19-0000010	31-01-2019	21-100-03	3.361.090	0	
11	00.000.000.0-000.000	TRIMO		13-01-19-0000011	31-01-2019	21-100-03	2.897.658	0	
12	00.000.000.0-000.000	DANNANG FERDY SETYAWAN		13-01-19-0000012	31-01-2019	21-100-03	3.021.774	0	
13	00.000.000.0-000.000	BAIRANG		13-01-19-0000013	31-01-2019	21-100-03	2.170.542	0	
14	00.000.000.0-000.000	HARTONO		13-01-19-0000014	31-01-2019	21-100-03	1.250.000	0	
15	00.000.000.0-000.000	MUCHLISIN		13-01-19-0000015	31-01-2019	21-100-03	3.421.000	0	
16	00.000.000.0-000.000	SUHARYONO		13-01-19-0000016	31-01-2019	21-100-03	2.932.500	0	
17	00.000.000.0-000.000	DWI AJATMONO		13-01-19-0000017	31-01-2019	21-100-03	2.720.000	0	
18	00.000.000.0-000.000	FRITO RAHMADANI		13-01-19-0000018	31-01-2019	21-100-03	1.000.000	0	
19	00.000.000.0-000.000	WAHYU		13-01-19-0000019	31-01-2019	21-100-03	2.465.000	0	
20	00.000.000.0-000.000	DIAN		13-01-19-0000020	31-01-2019	21-100-03	2.677.000	0	
Jumlah							82.590.127	0	



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 01 - 2019

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
SPT NORMAL SPT PEMBEKULAN KE-1

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPRAN : (000) (000) (000)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 000
2. NAMA :
3. ALAMAT :
NO. TELEPON :
EMAIL :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	4	32.750.000	1.182.083
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	14	38.910.252	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKTI PEGAWAI YANG MENEMUKAN LABA YANG BERKAITAN DENGAN BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKTI PEGAWAI YANG MENEMUKAN LABA YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
	MANTAN PEGAWAI YANG MEMERAWANG PRODUK, TANTUM, BOWHARU, MISAL LAIN	21-100-11	0	0	0
	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENANCIAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PERLU LAINNYA	21-100-99	0	0	0
	PEGAWAI/PEMBETU/ JASAPESERTA KEGIATAN/ PENERIMA/ PEMBERI BUKTI LABA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	21-100-99	0	0	0
	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		18	71.660.252	1.182.083

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR

STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) 0,00 0

KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:
MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0,00 TAHUN KALENDER (mm) 0,00 0

JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) 0,00 0

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 9 - ANGKA 14) 0,00 1.182.083

LAMBATKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEKULAN DAN/ATAU ANGKA 14 ANGKA 15 APABILA PPh LEBIH DISETOR

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENCIAN DARI BAGIAN 9 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN) 0,00 1.182.083

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEKULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) 0,00 0

KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) 0,00 -

NPWP PEMOTONG: 01.456.835.6 - 512 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MADYAT PENSUK, TULUNGWARI HARI TUKADU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAHARAN SEJAKIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEMBAYAR NEGARA, PEKAWAN NE (BER-SIPIL) ANGGOTA TAMPOLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KELOMPOK KELUARGA NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUALAN NEGARA (S.D.S))		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I <small>(0.01) (untuk Satu Masa Pajak)</small>	LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <small>(0.05)</small>	1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - II <small>(0.02) (untuk Satu Tahun Pajak)</small>	LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <small>(0.06)</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - III <small>(0.03)</small>	LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMBAYARAN (Pbk) <small>(0.07)</small>	1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <small>(0.04)</small>	LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <small>(0.08)</small>	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

LEMBAR PEMOTONG SURAT KUASA 6. TANDA TANGAN

NPWP: 01.456.835.6 - 512 000

NAMA: _____

TANGGAL: 16 - 08 - 2019 (dd - mm - yyyy)

TEMPAT: _____



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK: 01 - 2019

NPWP PEMOTONGAN - 11111111111111111111

000

FORMULIR 1721 - II
Lampiran 1: Lembar KPP
Lampiran 2: Lembar Pemotongan

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan cara pendudukan melalui rekening formulir 1721-01

NO	NPWP	IS	SI	NO BUKTI PEMOTONGAN	TANGGAL DIBAYAR	KODE OLAK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN PPh (Rp)	PPH DIBAYAR (Rp)	KODE NEGARA DOMESTI
1	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000001	31-01-2019	21-100-03	3.302.000	0	0
2	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000002	31-01-2019	21-100-03	3.861.201	0	0
3	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000004	31-01-2019	21-100-03	3.847.000	0	0
4	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-02-00005	31-01-2019	21-100-03	3.872.209	0	0
5	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-00-00007	31-01-2019	21-100-03	3.160.371	0	0
6	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000008	31-01-2019	21-100-03	3.218.448	0	0
7	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000010	31-01-2019	21-100-03	3.301.090	0	0
8	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000011	31-01-2019	21-100-03	2.897.858	0	0
9	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000014	31-01-2019	21-100-03	1.250.000	0	0
10	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000018	31-01-2019	21-100-03	1.000.000	0	0
11	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000019	31-01-2019	21-100-03	2.465.000	0	0
12	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000020	31-01-2019	21-100-03	2.877.000	0	0
13	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000021	31-01-2019	21-100-03	2.868.000	0	0
14	00.000.000.0-000.000			1.3-01-19-0000022	31-01-2019	21-100-03	2.633.275	0	0
15									
16									
17									
18									
19									
20									



8.25% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #12211097

BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara Indonesia, sebesar kurang lebih 84,44% di tahun 2019 dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Maka sepantasnya apabila penerimaan pajak menjadi pilar utama penerimaan negara untuk menjamin perkembangan, pengadaan infrastruktur dan perekonomian negara. Pemerintah banyak menerbitkan aturan dan perundang-undangan perpajakan guna menjamin lancarnya sistem pemungutan pajak di Indonesia. Peraturan perundangan tersebut mengalami banyak revisi atau perubahan mengikuti perkembangan jaman. Misalnya pembaharuan aturan terkait besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2013, tarif PTKP untuk WP dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp24.300.000 dan tambahan Rp2.025.000 untuk setiap tanggungan, tarif ini berlaku hingga tahun 2014. Selanjutnya direvisi dengan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 berlaku tarif PTKP 2015 untuk status WP TK/0 sebesar Rp36.000.000 dan tambahan Rp3.000.000 untuk setiap tanggungan. Kemudian diperbaharui lagi terakhir berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2016 dengan status TK/0